

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program *Zero Waste* di Kecamatan Mojosari telah mengadopsi prinsip *reduce, reuse, recycle* dalam kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup, seperti melalui layanan pengangkutan sampah rutin dan pembinaan TPS3R. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya infrastruktur dan armada, kendala pendanaan, kinerja TPS3R yang belum optimal, serta lemahnya penegakan peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan belum sepenuhnya efektif tanpa perbaikan pada aspek teknis, kelembagaan, dan sosial.

Jika dianalisis melalui kerangka empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, pelaksanaan program masih dalam tahap awal dan pencapaiannya terbatas. Dalam dimensi komunikasi, informasi mengenai pemilahan sampah belum tersebar merata, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas. Dari sisi sumber daya, kekurangan personel, sarana, dan dana menjadi kendala utama. Pada aspek disposisi, budaya lama yang resisten terhadap perubahan serta tingkat komitmen yang beragam menghambat efektivitas pelaksanaan. Sementara itu, dari dimensi struktur birokrasi, masih dibutuhkan koordinasi antarinstansi, kejelasan peran, dan pembentukan gugus tugas untuk mendukung implementasi yang lebih terarah dan akuntabel.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai Tantangan dan Peluang Impelementasi program zero waste, beberapa saran dapat diberikan untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan program ini.

1. Untuk Penguatan Dimensi Komunikasi dan Disposisi Pelaksana Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan dan membentuk disposisi pelaksana yang lebih responsif terhadap perubahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto perlu merancang skema sosialisasi terintegrasi yang menggabungkan pendekatan partisipatif dengan dukungan teknologi informasi. Upaya ini dapat diawali dengan penyusunan modul pelatihan mengenai tata kelola sampah rumah tangga berbasis praktik langsung (*hands-on demo*), yang melibatkan aktor-aktor lokal seperti kader lingkungan, pengurus RT/RW, serta komunitas warga. Tujuannya adalah agar pemahaman terkait pemilahan sampah tidak hanya tersampaikan secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam konteks sosial sehari-hari. Selain itu, optimalisasi media digital, seperti penggunaan aplikasi seluler sederhana atau grup komunikasi berbasis WhatsApp, dapat mempercepat diseminasi informasi, memperlancar pelaporan pengumpulan sampah secara *real time*, serta membuka ruang interaktif bagi umpan balik masyarakat. Melalui pendekatan ini, kesadaran masyarakat terhadap konsep *Zero Waste* menjadi lebih aktif dan terukur. Penguatan motivasi juga dapat diwujudkan dengan memberikan pengakuan simbolik kepada wilayah yang berprestasi, misalnya melalui

penghargaan "RT Peduli Sampah" sebagai bentuk apresiasi publik terhadap keberhasilan menurunkan volume sampah.

2. Penataan Ulang Sumber Daya dan Struktur Birokrasi Guna mengatasi kendala dalam dimensi sumber daya dan struktur birokrasi, diperlukan langkah strategis berupa restrukturisasi alokasi anggaran serta penataan ulang mekanisme kerja lintas sektor yang lebih terkoordinasi. DLH disarankan untuk mengalokasikan dana secara khusus bagi pengadaan, perawatan, dan peningkatan kapasitas armada pengangkut serta operasionalisasi fasilitas TPS3R. Skema pendanaan yang bersifat kolaboratif, melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, serta partisipasi sektor swasta, akan memperkuat keberlanjutan program. Selain itu, pembentukan Gugus Tugas Zero Waste di tingkat kecamatan yang beranggotakan unsur DLH, pemerintah kecamatan dan desa, petugas kebersihan, serta perwakilan masyarakat menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan koordinasi yang sistemik. Gugus tugas ini bertanggung jawab dalam penyusunan SOP operasional, pemantauan target 3R, serta pelaksanaan evaluasi kinerja secara triwulan. Dengan adanya struktur kelembagaan yang lebih terpadu serta ketersediaan sumber daya yang memadai, pelaksanaan program Zero Waste di Mojokerto akan bergerak ke arah yang lebih terukur, efisien, dan berkelanjutan.

3. Penguatan Partisipasi Publik Dari perspektif tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui mekanisme pelibatan masyarakat dalam regulasi, yaitu pelibatan aktif warga dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik. Salah satu bentuk konkret yang dapat

diterapkan adalah pembentukan forum dialog antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat rutin dan terbuka. Forum ini dapat menjadi wadah bagi perwakilan warga, petugas kebersihan, dan DLH untuk bersama-sama mengidentifikasi tantangan lapangan, merumuskan inovasi lokal, serta menyesuaikan regulasi dan SOP agar lebih kontekstual. Model kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga membangun kepercayaan publik secara gradual. Di samping itu, penerapan *feedback loop* yang sistematis memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pengalaman langsung warga. Mekanisme ini berfungsi sebagai alat ukur akuntabilitas dan sekaligus fondasi dalam proses penyempurnaan kebijakan. Dengan demikian, struktur *governance network* di Mojosari dapat diperkuat secara substantif, dan program Zero Waste akan tumbuh sebagai inisiatif kolektif yang kredibilitasnya diperkuat oleh partisipasi warga sebagai subjek aktif dalam tata kelola lingkungan.